



JURISDICTION COLLECTIVE ACTION FORUM, DIALOGUE #13

PERJALANAN AGENDA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGS) DI INDONESIA

Rabu, 31 Agustus 2022, 15.30 - 17.00 (GMT+7)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada tahun 2030. Kerangka pelaksanaan TPB/SDGs kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 59/2017 dan diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024. Bappenas sebagai koordinator pelaksanaan TPB/SDGs memegang mandat untuk menyusun dan menetapkan Peta Jalan TPB/SDGs dan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs yang berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs.

Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk merestrategi visi Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim yang bertumpu pada Tujuan/Gol 13 (Perubahan Iklim), sekaligus menjadi basis utama untuk mendukung tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Pelokalan Agenda TPB/SDGs di tingkat subnasional dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang saat ini sudah dilakukan di 31 Provinsi di Indonesia.

Pencapaian target ambisius TPB/SDGs hanya dapat dicapai melalui kemitraan multipihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, CSO, akademisi, filantropi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan potensi filantropi yang besar di Indonesia, Perhimpunan Filantropi Indonesia hadir untuk memajukan dan memperkuat ekosistem filantropi di Indonesia untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian terdapat IBCSD, yang saat ini sedang menginisiasi GRASP 2030 (Gotong Royong Atasi Susut & Limbah Pangan di 2030) guna menuju produksi dan konsumsi pangan yang lebih berkelanjutan. Di tingkat subnasional, Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi pilot untuk menerapkan pertumbuhan rendah karbon yang hasilnya akan berkontribusi terhadap pencapaian TPB/SGDs.

CATATAN PEMBUKA



Wahyuningsih Darajati

Perencana Ahli Utama, Kedepatian Bidang
Kemaritiman dan SDA - BAPPENAS

Kemitraan Multi Pihak dalam Mendukung Pencapaian TPB/SDGs dan Pembangunan Rendah Karbon

Di dalam perencanaan pembangunan nasional, Indonesia telah berupaya penuh untuk mengintegrasikan komitmen pencapaian TPB/SDGs dan komitmen penurunan emisi. Tujuan/Gol 13 (Perubahan Iklim) menjadi basis utama untuk mendukung tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang telah memiliki target, lokasi dan sektor yang jelas di dalam RPJMN 2020-2024 untuk menuju Ekonomi Hijau. Pembangunan Rendah Karbon mengusung lima strategi utama yaitu Pemulihan Lahan Berkelanjutan, Penanganan Limbah & Ekonomi Sirkular, Pengembangan Industri Hijau, Rendah Karbon Pesisir & Laut, dan Pembangunan Energi Berkelanjutan.

Lebih lanjut, pelokalan TPB/SDGs merupakan upaya penting untuk mengarusutamakan TPB/SDGs sampai ke tingkat kabupaten melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), dokumen rencana kerja lima tahunan sebagai dasar kegiatan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian target daerah. RAD disusun oleh gubernur dan melibatkan Bupati/Walikota, CSO, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, sesuai dengan mandat Perpres No. 59/2017. RAD tersebut disusun selaras dengan RPJMD yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

TPB/SDGs merupakan target yang ambisius dan hanya dapat dicapai melalui kemitraan. Oleh karena itu Bappenas menekankan pentingnya kolaborasi multipihak yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi

dan bisnis, akademisi, pakar, CSO dan media. Sesuai Perpres No. 59/2017, pemerintah mengundang seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs, memastikan penerapan prinsip inklusivitas dan no one left behind, menyelaraskan dan mengintegrasikan program prioritas pemerintah dengan program non-pemerintah, dan mengatasi masalah teknis TPB/SDGs, seperti keterbatasan sumber daya, informasi, dan sumber dana. Pemerintah berperan penting sebagai regulator, koordinator, pelaksana, katalis dan promotor. Di dalam menjalankan kemitraan ini tentunya harus ada apresiasi ataupun insentif untuk setiap kontribusi yang mendukung pencapaian TPB/SDGs. Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs telah mengeluarkan Buku Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dan Publikasi

[The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia.](#)

Silahkan mengunduh materi presentasi [disini](#).

PANELIS



Ir. Emri Juli Harnis, M.T., PhD

Kepala Badan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

*Diwakilkan oleh Abdul Madian, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bappedalitbang Provinsi Riau

Pendekatan Yurisdiksi Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Riau

Provinsi Riau memiliki luas wilayah 8,9 juta hektar dengan luas hutan 7,1 juta hektar dan lebih dari 50% nya yaitu 3,9 juta hektar berupa wilayah gambut. Kebakaran hutan dan lahan besar yang terjadi pada tahun 2015 di Riau menjadikan Riau mulai memperhatikan isu lingkungan lebih mendalam. Di bawah pemerintahan Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar, komitmen untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dituangkan dalam inisiatif Riau Hijau. Riau Hijau adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan, yang telah diintegrasikan dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024. Komitmen tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Riau No. 9 Tahun 2021. Saat ini, Forum Riau Hijau tengah dalam proses pembentukan, sesuai dengan mandat yang tercantum dalam RPJMD Riau.

Dokumen Riau Hijau disusun sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pendekatan bidang Kehutanan, Lahan Gambut dan Blue Carbon; Pertanian; Energi; Transportasi dan Industri; dan Pengelolaan Limbah. Penyusunan dokumen tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu akademisi, swasta, CSO, filantropi, dan media. Lebih lanjut, Rencana Aksi Riau Hijau disusun sebagai komponen penting dari Dokumen Riau yang meliputi 3 kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. Meningkatkan Bauran Energi dari Sumber Daya Energi Terbarukan.

Berbagai upaya implementasi Rencana Aksi Riau Hijau telah dilaksanakan mulai dari Rehabilitasi Lahan Kritis 2016-2020 seluas 25.927 ha hingga Penyusunan Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAP KSB) yang telah ditetapkan dalam Pergub Riau No. 9/2022. Riau merupakan salah satu provinsi percontohan perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia dan juga menjadi provinsi pertama uji coba Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Non-State Actor (Pelaku Selain Pemerintah) dalam platform AKSARA Bappenas.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi bersama antara lain:

1. Keterbatasan data dan sumber daya manusia untuk melakukan analisa serapan dan emisi karbon yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar MRV (measurable reportable and verifiable).
2. Tingginya aktivitas antropogenik (aktivitas manusia) yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.
3. Rendahnya teknologi untuk meminimalisir emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

Pada akhirnya, kolaborasi multipihak menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan karena pemerintah tidak mampu untuk bekerja sendiri.

Silahkan mengunduh materi presentasi [disini](#).



Gusman Yahya

Direktur Eksekutif - Filantropi Indonesia

Peran Filantropi dalam Mendukung Kemitraan Multi Pihak untuk Pencapaian SDGs di Daerah

Berdiri sejak 2003, Filantropi Indonesia (FI) yang berisikan organisasi dan individu pegiat filantropi bertujuan untuk memajukan filantropi agar dapat berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam Rencana Strategis 2021-2024, Filantropi Indonesia menetapkan tujuan strategis untuk menjadi Filantropi HUB yang terbaik, terukur, dan terpercaya yang dapat mendorong FI menjadi platform utama para filantropis untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai Filantropi HUB, FI memiliki beberapa peran yaitu sebagai wadah untuk memajukan aksi kolektif melalui program dan inisiatif yang berkualitas; sebagai katalis untuk mendorong kolaborasi, koreksi dan gotong royong; sebagai thought leaders atau pemimpin pemikir untuk memajukan ekosistem dan kebijakan filantropi di Indonesia. Program Filantropi HUB difokuskan pada empat sektor, yaitu Philanthropy Learning Center, Policy, Research & Data Center, SDGs Collaboration Center, dan Campaign & Communication Center.

Pada bulan Juli 2022 lalu, FI mengeluarkan publikasi tahunannya, Indonesia Philanthropy Outlook 2022 yang berisi tren, prospek maupun peluang filantropi setiap tahunnya. Dalam publikasi itu, didapati bahwa mayoritas lembaga filantropi atau hampir 85% telah menggunakan TPB/SDGs sebagai rujukan dalam penyusunan program-programnya. Dari publikasi tersebut juga menyebutkan 5 bidang

program prioritas filantropi di Indonesia yaitu:

- ✔ Pendidikan
- ✔ Pemberdayaan Ekonomi
- ✔ Iklim & Lingkungan
- ✔ Advokasi
- ✔ Kesehatan

FI mendukung pencapaian TPB/SDGs dan Pembangunan Rendah Karbon dan terus mendorong anggotanya untuk mengarusutakan TPB/SDGs dalam program-programnya. Saat ini, FI sedang mengembangkan sistem pemantauan dampak yang kuat untuk melacak tujuan bersama menuju pencapaian TPB/SDGs. Selain itu, FI mendukung pembentukan pembiayaan inovatif yang akan mempercepat pencapaian TPB/SDGs, pengembangan Filantropi di daerah melalui Chapter Wilayah, dan bekerja sama dengan IPMI Case Center dalam pengembangan studi kasus, publikasi, dan policy brief sebagai referensi pemangku kepentingan dalam menjalankan strategi programnya mendukung TPB/SDGs.

Harapannya adalah forum seperti JCAF ini dapat menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, filantropi, pelaku usaha untuk bisa berkolaborasi dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan subnasional. FI tentunya akan menyambut baik undangan dari pemerintah daerah untuk dapat berdialog bersama dan berkolaborasi, juga membuka peluang untuk kerjasama dengan semua pihak, dalam hal mensukseskan TPB/SDGs melalui pendekatan multipihak.

Silahkan mengunduh materi presentasi [disini](#).



Aloysius Wiratmo

Manager Pembangunan Program - Indonesia Business Council for Sustainable Development

Tackling Food Loss & Waste at Sub-national Level: Enabling Sustainable and Climate-Resilient Food System

Permasalahan susut dan limbah pangan yang termaktub dalam Gol TPB/SDGs 12 merupakan salah satu isu global yang penting untuk diatasi bersama. Berdasarkan data FAO tahun 2011 dan 2015, dalam skala global, 1/3 produksi pangan terbuang percuma setiap tahunnya yang menyumbang emisi sebesar 3,6 gigaton CO₂ atau setara 8% dan mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar USD 750 miliar pada sektor hulu dan USD 1,000 miliar pada sektor hilir. Di Indonesia sendiri, kajian Bappenas tahun 2021 menunjukkan bahwa susut & limbah pangan yang berasal dari lima tahapan rantai pasok pangan (dimulai dari tahap produksi, tahap pascapanen dan penyimpanan, tahap pemrosesan dan pengemasan, tahap distribusi dan pemasaran, hingga tahap konsumsi) pada tahun 2000-2019 mencapai 115-184 kg/kapita/tahun dengan kerugian ekonomi mencapai 213-551 triliun rupiah/tahun. Kajian KLHK tahun 2021 menunjukkan bahwa 40.4% dari jumlah sampah di Indonesia berasal dari limbah pangan dan menyumbang sekitar 7.29% emisi. Selain itu, terdapat kerugian lainnya seperti hilangnya lahan, kelangkaan air, hilangnya keanekaragaman hayati, naiknya harga pangan, hingga kerusakan lahan gambut.

Oleh karena itu pada tahun 2021, IBCSD menginisiasi program GRASP 2030 (Gotong Royong Atasi Susut & Limbah Pangan di 2030), sebuah inisiatif yang berbasis voluntary agreement untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan khususnya para pelaku bisnis dalam seluruh rantai pasok pangan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan susut dan limbah pangan (food loss and waste) guna menuju produksi dan konsumsi pangan yang lebih berkelanjutan. Inisiatif ini dilandasi oleh komitmen dan aksi kolaboratif untuk mencapai Gol 12.3 TPB/SDGs yaitu dapat mengurangi separuh limbah pangan per kapita di tahap distribusi dan konsumsi dan mengurangi susut pangan di tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan di pascapanen pada tahun 2030. Pencapaian Gol TPB 12.3 menjadi sangat penting karena sekaligus akan berkontribusi pada pencapaian 13 Gol TPB lainnya khususnya Gol 2 (Tanpa Kelaparan).

TPB/SDGs juga telah diintegrasikan dalam RPJMN 2020-2024 dimana susut dan limbah pangan masuk dalam Prioritas 1 (Pembangunan Ekonomi untuk

Pertumbuhan yang Berkualitas), terutama untuk Program Prioritas 3 mengenai perbaikan ketersediaan akses dan juga juga kualitas pangan konsumsi.

GRASP berkolaborasi dengan WRAP UK, lembaga internasional yang berbasis di London yang telah memulai inisiatif ekonomi sirkuler sejak tahun 2015 dan telah memiliki lebih dari 200 anggota. Inisiatif semacam GRASP ini relatif baru di Indonesia, dibandingkan dengan gerakan-gerakan serupa yang telah banyak dilaksanakan di negara lain. Hingga saat ini, GRASP telah memiliki 23 signatories. Selain itu, GRASP juga berkolaborasi dengan Bappenas, Badan Pangan Nasional dan KLHK.

Kolaborasi merupakan kunci dalam inisiatif ini. Selain di tingkat nasional, harapannya, GRASP juga dapat berkolaborasi dengan sub-nasional dalam mengatasi isu susut dan limbah pangan ini. Maka, terdapat beberapa hal yang dapat IBCSD tawarkan untuk potensi kolaborasi.

Pertama

Asistensi untuk intervensi kebijakan daerah, termasuk penyusunan suatu peta jalan sehingga pemangku kepentingan seperti sektor publik dan swasta dalam mengintegrasikan pengurangan susut dan limbah pangan ke dalam upaya mitigasi dan adaptasinya terhadap perubahan iklim.

Kedua

Fasilitasi peningkatan kapasitas melalui pemanfaatan kegiatan GRASP, mengadaptasi tools yang telah terbukti dan best practices dalam menangani susut dan limbah pangan di seluruh rantai pasokan. GRASP berkolaborasi dengan Hotel Sintesa di Palembang sebagai proyek percontohan pertama dengan menggunakan teknologi Leanpath.

Ketiga

Kolaborasi sektor publik dan swasta dalam pengembangan strategi susut dan limbah pangan untuk mencapai sistem pangan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim di seluruh rantai pasok. Keempat, pengenalan metode Target, Measure, Act (TMA) dalam mengadopsi target pengurangan FLW yang jelas, selaras dengan Gol TPB/SDGs 12.3, mengukur susut dan limbah pangannya untuk mengidentifikasi sumbernya dan kemudian menyusun rencana aksi untuk menanggulangi isu tersebut di dalam operasional di seluruh rantai pasok dan rumah tangga.

Silahkan mengunduh materi presentasi [disini](#).

PENANGGAP



H. Nanang Bakran, ST., MT.

Kepala - BAPPEDALITBANG Kabupaten Berau

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang berkomitmen dalam pencapaian TPB/SDGs. Berau telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mendukung TPB/SDGs seperti Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Peraturan Bupati Berau No. 52 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Berau No.595 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan. Sesuai mandat Perpres nomor 59 tahun 2017, Berau telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB), dokumen yang berisi rencana kerja lima tahunan untuk mencapai TPB/SDGs.

Luas hutan Berau mencapai 70% dari luas keseluruhan wilayahnya. Namun, adanya pembatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam menjaga wilayah hutannya membuat pemerintah daerah terbatas ruang geraknya untuk melaksanakan komitmennya dalam penjagaan hutan. Pembatasan kewenangan ini merupakan suatu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Berau karena berimplikasi pada keterbatasan dalam mengambil kebijakan terkait pelestarian hutan.

Saat ini, penggunaan pembukaan lahan telah merambah ke Kabupaten Berau. Namun pada akhirnya pemerintah kabupaten hanya dapat melaporkan insiden-insiden tersebut tetapi tidak bisa bertindak. Oleh karena itu, pemerintah Berau memerlukan bantuan dari pemerintah pusat terkait hal ini. Harapannya pemerintah pusat dapat berkunjung ke lapangan dan melihat kondisi ril yang terjadi di Berau. Lebih lanjut pengelolaan limbah makanan yang diinisiasi oleh IBCSD sepertinya dapat diterapkan di Kabupaten Berau.



Dr. Ir. H Wan Muhammad Yunus MT.

Kepala - BAPPEDA Kab. Siak

Kabupaten Siak memiliki wilayah gambut seluas 479,485 ha atau 57% dari total wilayahnya dan merupakan yang terluas di Pulau Sumatera. Dengan luasnya wilayah gambut menjadikan Siak menjadi rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 2.189 ha lahan terbakar di Siak pada tahun 2015 dan menjadi titik balik transformasi Kabupaten Siak dalam mengelola lingkungannya untuk lebih berkelanjutan. Maka inisiatif Siak Hijau lahir sebagai strategi untuk menanggulangi dampak kerusakan lingkungan terutama karhutla. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 22 tahun 2018 dan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2022. Lahirnya Perda Siak Hijau ini semakin mengukuhkan bahwa semua pihak hingga pemerintah kampung di Siak harus mendukung visi Siak Hijau. Peta Jalan Siak Hijau juga telah disusun sebagai landasan pelaksanaan program Siak Hijau bagi semua pihak baik pemerintah daerah dan pemerintah kampung, CSO, hingga sektor privat.

Inisiatif ini didukung oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Sedagho Siak dan KPPSH (Koalisi Privat Sektor untuk Siak Hijau). Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci untuk mencapai visi Siak Hijau. Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah Siak untuk mendukung Siak Hijau seperti :

- ✔ Mengembangkan kebijakan TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi) untuk mendorong pemerintah kampung dalam meningkatkan kinerja lingkungan hidupnya.
- ✔ Tata kelola hutan dan gambut.
- ✔ Memfasilitasi sertifikasi ISPO/RSPO untuk para petani.
- ✔ Inventarisasi jumlah perkebunan sawit yang telah maupun belum mendapatkan sertifikasi ISPO/RSPO.
- ✔ Sosialisasi FOLU Net Sink.

Bupati Siak juga telah membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Siak Hijau. Bappenas juga telah mengenalkan platform Terpercaya yang nantinya dapat diterapkan di Siak.



Adapun capaian Siak adalah pada tahun 2019, Siak berhasil menurunkan karhutla menjadi 1149 hektar dan 126,7 hektar pada tahun 2021.

Namun, tentu saja masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Siak misalnya mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan sehingga secara perlahan dapat mengurangi sampah dan akhirnya dapat menghilangkan kegunaan TPA karena sektor TPA menguras anggaran daerah yang besar.



Drs. Amini Maros MSi

Kepala - BAPPEDA Kab. Kubu Raya

*Diwakilkan oleh Harbimo Utoyo, S. Hut., Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kab. Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten dengan wilayah gambut dan mangrove terluas di Kalimantan Barat. Luas wilayah gambut Kubu Raya mencapai 523.174 hektare atau sekitar 30% luas keseluruhan lahan gambut di Kalimantan Barat dan lahan mangrove seluas 129.604,125 hektar atau sekitar 75% luas hutan mangrove Kalimantan Barat. PDRB Kuburaya didominasi oleh industri pengolahan dimana 31% sektor utama merupakan subsektor makanan dan minuman dan sektor kedua adalah pertanian yang menyumbang kurang lebih 13% terhadap PDRB.

Pasca terbitnya Undang-undang 23/2014, kewenangan kawasan hutan berada di pemerintah provinsi sehingga pemerintah kabupaten memiliki kewenangan terbatas dalam hal pengelolaan kawasan hutan dan tetap memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, pemerintah Kubu Raya mencari solusi dengan berkolaborasi dengan para mitra pembangunan. Banyak hal yang telah dilaksanakan dengan dukungan oleh donor, mitra pembangunan, CSO, ataupun kelompok kerja dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kubu Raya telah mengadakan Musrenbang Tematik Mitra Pembangunan untuk melakukan pemetaan guna mengidentifikasi para mitra pembangunan seperti CSO dan pelaku usaha yang ada dan bekerja di Kubu Raya terkait dengan kawasan hutan maupun pengelolaan dan perlindungan gambut. Musrenbang telah berjalan selama dua tahun dan berhasil merangkul CSO berkolaborasi dalam rangka menemukan skenario yang cocok dalam pembangunan dan perlindungan kawasan hutan dan gambut di Kubu Raya. Hasil Musrenbang adalah pembentukan Pokja PPPH (Percepatan Pelaksanaan Pertumbuhan Hijau) sebagai akselerator dalam mendorong kebijakan pendanaan investasi dan kerjasama dengan mitra, donor maupun lembaga lainnya yang ada di Kubu Raya.

Pokja PPPH berkolaborasi dengan ICRAF telah memfasilitasi penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Kolaborasi dengan CSO juga telah membantu pelaksanaan peningkatan kapasitas di tingkat desa maupun kelompok hutan desa. Untuk diketahui, Kubu Raya ditetapkan sebagai daerah percontohan Pembangunan Geospasial Daerah dalam rangka memetakan wilayah Kubu Raya sesuai karakteristiknya. Hingga saat ini, pemetaan sudah dilaksanakan sampai ke tingkat desa dengan pendataan penduduk telah mencapai 75%. Para mitra banyak membantu dalam pembangunan geoportal dan peningkatan literasinya.

Pencapaian lainnya adalah edukasi ekosistem gambut dan mangrove di tingkat SD dan SMP melalui kurikulum muatan lokal sehingga generasi muda Kubu Raya mengenal dan memahami ekosistem, permasalahan dan potensi gambut dan mangrove. Pengembangan alternatif usaha hasil hutan bukan kayu juga dilaksanakan sebagai upaya pengalihan fokus masyarakat dalam mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan melalui inkubasi usaha UMKM unggulan desa. Beberapa hasil hutan bukan kayu yang tengah dikembangkan misalnya madu mangrove, kepiting bakau, dan kerupuk kepiting dari Desa Batu Ampar, madu kelulut dari Desa Padang Tingkar, ekstrak minyak serai wangi dari Desa Muara Baru, jahe dan kunyit bubuk dari Desa Sumber Agung, virgin coconut oil dari Desa Kubu. Pemerintah juga memberikan pelatihan berbasis sumber daya alam dalam rangka mencari diversifikasi produk dari hasil alam seperti produk gula semut yang berasal dari nira kelapa, minyak goreng brondol sawit, minyak serai wangi, abon dan amplang ikan nila.

Keterbatasan dana APBD mengharuskan pemerintah Kubu Raya berinovasi untuk mencari peluang pembiayaan di luar APBD dan membuka peluang investasi hijau sesuai dengan potensi yang ada di Kubu Raya.

Press Release :

[Pemerintah Masukkan Paris Climate Agreement ke dalam RPJMN 2020-2024](#)

Tribunnews.com, 13 September 2022
01:04 WIB

Penulis: Ilham Rian

[Sinergi Antarpihak Dinilai Menjamin Pembangunan Berkelanjutan](#)

Mediaindonesia.com, 13 September 2022, 08:17 WIB

Penulis: M Sholahudin

[Kerja Sama Antarpihak Dinilai Menjamin Pembangunan Berkelanjutan](#)

Medcom.id, 12 September 2022 20:54

Penulis: M Sholahudin

[Peran Strategis Para Pihak Di Tingkat Yurisdiksi Untuk Akselerasi Pencapaian Agenda Nasional](#)

Rm.id, 12 September 2022 16:07 WIB

Penulis: OKTAVIAN SURYA DEWANGGA

[BAPPENAS: Indonesia Menuju Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon](#)

Validnews.id, 12 September 2022 -
15:00 WIB

Penulis: Nuzulia

[Pemerintah Masukkan Paris Climate Agreement ke dalam RPJMN 2020-2024](#)

ndonesiatoday.co.id, 13 September 2022
02:04 AM

Penulis: Redaksi

Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF)

Jurisdiction Collective Action Forum aims to provide an open and safe environment for all parties to contribute constructively. It offers opportunities to empower the JCAF Collaborators in identifying current challenges, opportunities, and priorities in the respected Jurisdictions for scalable solutions. The JCAF approach is cost-effective and can bring wider communities, unlock investment opportunities, and to develop evidence-based publications. The forum is initiated and collectively co-created by 11 forum collaborators, which are : Cocoa Sustainability Partnership (CSP), Daemeter Consulting, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Inisiatif Dagang Hijau (IDH), IPMI Case Centre, Landscape Indonesia, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Indonesian Philanthropy Association (PFI), Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAGRO), Proforest, and Tropical Forest Alliance (TFA).

The Forum Objectives and Outputs

JCAF intends to catalyse shared-lessons learned from the perspective of multi-stakeholders to promote collective actions, strengthening the enabling environment, and advancing investment into jurisdiction. Highlighting challenges and opportunities to strengthen the multi-stakeholder approach, identify the common approach, and share best practices. As well as identify, demonstrate and develop evidence-based business and investment cases on best practices of collective actions, good governance, leadership, and investment to advance jurisdiction sustainability.

With the series of dialogues, the JCAF events will create greater understanding of successful strategies and common approaches that will enable stakeholders to learn, experience and jointly develop evidence-based business cases. Successfully identify policies and regulations gaps and harmonization that will require stakeholders' collaborations to jointly develop holistic policy briefs and recommendations. The dialogue is envisioned to offer a model for co-creating, collaboration, and mobilization of collective action toward a durable solution which address critical sustainability issues at a meaningful and appropriate scale whilst at the same time collectively pursuing green prosperity at the jurisdiction level and contribute toward national strategy of Low Carbon Development and Sustainable Development Goals.

Acknowledgement

JCAF Collaborators would like to express sincere gratitude to all JCAF partners, Jurisdictional Approach (JA) proponents in Southeast Asia and everyone involved in the ideation, development and finalization of the JCAF series of dialogues.

Report Writer

Erwin Widodo

Jurisdictional Consultant and Writer

Editor

Janne Siregar

Southeast Asia Program and Communication Lead

Publication Coordinator

Leonardo Fachry

Contact:

Jurisdiction Collective
Action Forum at:
jcaf.secretariat@ibcsd.or.id

©2022

Scan me :

